

**ANALISIS KETERLIBATAN *STAKEHOLDER*
DALAM PROGRAM DESA BROADBAND TERPADU
DI DESA KARANGMOJO KECAMATAN KARANGMOJO
DAN DESA PUTAT KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNG KIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



NASKAH PUBLIKASI

**Disarikan dari Skripsi yang Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam
Indonesia**

Oleh :

FEBRI SETIAWAN EKA SAPUTRA

NIM. 14321172

SUMEKAR TANJUNG, S.Sos., M.A

NIDN: 0514078702

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS KETERLIBATAN *STAKEHOLDER* DALAM PROGRAM DESA
BROADBAND TERPADU DI DESA KARANGMOJO KECAMATAN KARANGMOJO
DAN DESA PUTAT KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNG KIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun oleh
FEBRI SETIAWAN EKA SAPUTRA
14321172

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi pada.....

16 AUG 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,



SUMEKAR TANJUNG, S.Sos., M.A.

NIDN 0514077870



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya**

Universitas Islam Indonesia



Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A.

NIDN 0510038001

**ANALISIS KETERLIBATAN STAKEHOLDER
DALAM PROGRAM DESA BROADBAND TERPADU
DI DESA KARANGMOJO KECAMATAN KARANGMOJO
DAN DESA PUTAT KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNG KIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

FEBRI SETIAWAN EKA SAPUTRA

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII

Sumekar Tanjung

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII

Abstract

This study aims to explain how the involvement of stakeholders in the Karangmojo Village, Karangmojo Distric, and Putat Village, Patuk Distric, Gunung Kidul Regency, Special Region Of Yogyakarta in managing the village's website to crowned as the most active village website between 2015-2018 period, by the government of Gunung Kidul Regency. Research has improved because it is considered as a new issue and still there is not so many research about this topic. The analysis undertaken here used mix of new media theory and participation, as new media relate to websites, and participations related to stakeholder engagement. The method used in this research is qualitative by using descriptive design, observation, interview, and documentation.

The results obtained in this study are stakeholders in Karangmojo Village and Putat Village are, Village's government, village's website management team, villagers, distric government which consisting of Bappeda, Kemkominfo and there are NGO that participate in the program, Combine Resource Institution. Stakeholder involvement in managing the village website website is to support and control the program and conduct regular training related websites and journalist and make web osbservers of village website activation throught the village of Gunung Kidul.

Key words: *Participation, Village Website, Karangmojo Village Website, Putat Village Website.*

A. PENDAHULUAN

Desa adalah sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, karena desa terbentuk dari sekumpulan masyarakat yang mempunyai hak untuk mengurus sistem pemerintahannya sendiri. Desa ini terdapat di seluruh dunia, hanya nama, bentuk, dan susunannya saja yang berbeda, begitupun juga di Indonesia nama, bentuk dan susunan desa di Indonesia tidaklah sama. Karena Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, bahasa, dan kebudayaan (Soeparmo,

1977: 14). Menurut undang-undang Republik Indonesia desa merupakan kumpulan dari kesatuan masyarakat yang mempunyai wewenang pada suatu wilayah dan mengurus sistem pemerintahan di wilayah tersebut serta telah diakui oleh Negara Republik Indonesia (UU No 6 tahun 2014).

Beberapa tahun belakangan ini masyarakat di desa sudah mulai berbenah dan sadar akan perkembangan teknologi yang begitu cepat, karena dengan memanfaatkan teknologi sangatlah efektif untuk mengembangkan potensi, sarana informasi dan juga promosi yang akan lebih mudah diterima masyarakat secara luas. Salah satu kecanggihan teknologi yang digunakan desa adalah teknologi informasi, hal ini terjadi akibat adanya ledakan informasi, ledakan tersebut timbul akibat perkembangan teknologi (Siagian, 1981: 23).

Sesuai dengan survei dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia atau bisa disingkat APJI melaporkan bahwa :

Pada tahun 2016 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 51,9% atau sekitar 132,7 juta orang dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 256,2 juta orang. Data tersebut membuktikan bahwa, sudah separuh lebih dari total penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Penggunaanya meliputi laki-laki sebanyak 52,5% dan pengguna perempuan sebanyak 47,5% di sini dapat kita lihat bahwa laki-laki lebih dominan dalam menggunakan internet. Meskipun separuh lebih penduduk Indonesia sudah menggunakan internet namun persebarannya masih belum merata seperti di Pulau Jawa pengguna internet di Pulau Jawa mencapai 65%. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia, pengguna internet di pulau lain masih sangat sedikit seperti di Sumatera terdapat 15,7%, Bali dan Nusa Tenggara terdapat 4,7%, Kalimantan 5,8%, Sulawesi 6,3%, Papua dan Maluku sebanyak 2,5%. Data tersebut telah membuktikan bahwa fasilitas internet di Indonesia masih belum merata dan masih didominasi di Pulau Jawa karena pengguna internet di Pulau Jawa mencapai 65% (Dokumen Infografis APJII, 2016).

Untuk mengatasi masalah tersebut, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah merancang sembilan agenda prioritas yang dinamakan dengan nawa cita. Tujuan program ini adalah untuk membangun Indonesia yang lebih berdaulat, Nawa cita poin ke 3 berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan (Kumolo, 2017: 47-48).

Cita ketiga ini juga menyebutkan, upaya untuk memperkuat daya saing Indonesia secara global yang seharusnya dimulai dengan memperkuat daerah-daerah. Dalam paradigma ekonomi yang inklusif dan bisa membangun konektivitas ekonomi antara barat dan timur Indonesia, antara pesisir hingga ke pelosok, antara kawasan landai hingga ke pegunungan, antara kawasan desa hingga kota (Kumolo, 2017: 47-48).

Nawa cita poin ke 3 ini terkait dengan penelitian yang akan dilakukan karena pada poin tersebut membahas tentang pemerataan pembangunan di Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah desa yang mana penelitian ini membahas tentang desa. Program nawa cita sudah mulai dijalankan mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 sejak terpilihnya Jokowi-JK, dengan adanya program nawa cita tersebut diharapkan perkembangan teknologi akan cepat merata hingga pelosok-pelosok negeri agar semua rakyat Indonesia bisa menikmati kecanggihan teknologi.

Sehubungan dengan program nawa cita, Kominfo telah membuat program Desa Broadband Terpadu atau bisa disingkat DBT yang dibuat untuk daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdalam) hal ini merupakan langkah awal membangun Indonesia dari pinggiran yang merupakan poin ke tiga dari Nawa cita. Awal terbentuknya DBT sudah ada 50 desa yang dilengkapi dengan akses internet dan akan terus bertambah.

Desa Broad Terpadu itu sendiri merupakan desa yang telah dilengkapi dengan fasilitas atau jaringan internet, dengan menyesuaikan karakter penduduk setempat agar dapat memenuhi kebutuhan dalam membangun potensi desa, program ini ditujukan untuk desa nelayan, pertanian, hingga desa yang berada di pedalaman. Dengan adanya fasilitas internet ini di harapkan dapat mendukung dan membantu kegiatan masyarakat dalam kesehariannya (Idris, et.al, 2015: 18).

Namun untuk sekarang ini, hampir seluruh desa di Indonesia sudah memanfaatkan fasilitas tersebut. Seperti halnya di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kutip dari *kabargunungkidul.com* Kabupaten Gunung Kidul, mempunyai 18 Kecamatan , 144 desa dan 1.431 pedukuhan. Semua desa yang ada di Kabupaten tersebut sudah terhubung dengan jaringan internet dan mempunyai sistem informasi desa berbasis website dengan menggunakan domain

desa.id yang merupakan program dari KOMINFO (<http://www.kabargunungkidul.com/daftar-alamat-web-desase-gunungkidul/> akses tanggal 14 April 2017).

Dari 144 desa, terdapat 2 desa yang sudah mengelola program tersebut dengan baik dan menempati posisi 3 besar teratas sebagai desa informativ menurut Kabupaten Gunung Kidul yaitu Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo dan Desa Putat Kecamatan Patuk. Dalam periode Mei 2015 sampai dengan Mei 2018 Desa Karangmojo menempati posisi pertama sedangkan Desa Putat menempati posisi ke-tiga dari seluruh desa di Kabupaten Gunung Kidul . Capaian tersebut karena adanya kerjasama dan keterlibatan dari *stakeholder*.

Stakeholder sendiri adalah siapa saja yang memberikan dan yang terkena dampak dari aktivitas pembangunan. Pemangku kepentingan ini bisa individu, komunitas maupun kelompok sosial dan lembaga dari setiap tingkat golongan masyarakat (Gonsalves, et.al dalam Iqbal, Jurnal Litbang Pertanian, NO 26 (3), 2007: 90). Dalam penelitian ini yang mungkin menjadi pemangku kepentingannya adalah pemerintah desa, masyarakat desa, Kominfo dan lembaga sosial yang terkait.

Atas dasar itulah, peneliti akan mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam program Desa Broad Terpadu di Desa Karangmojo dan Desa Putat, serta menganalisis keterlibatan *stakeholder* di kedua desa tersebut.

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Matriks Perbandingan Penelitian

NO	Judul Penelitian	Tujuan	Objek	Metode	Kesimpulan
1	Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi pada Gerakan Desa Membangun)	Mengetahui program, paradigma pembangunan dan strategi pengembangan TIK di pedesaan oleh GDM, serta mengetahui contoh	Gerakan Desa Membangun	Studi kepustakaan dengan menganalisis konten website Gerakan Desa Membangun	GDM merupakan organisasi yang terbentuk dari gerakan masyarakat desa untuk membangun desanya dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dengan

		pengembangan pedesaan berbasis TIK.			adanya gerakan ini desa dapat mengelola dan menjalankan tata pemerintahan yang baik.
2	Upaya Membangun Sistem Informasi Desa Yang Bermakna	Mengoptimalkan sistem informasi Desa dengan memilih platform blog yang tersedia gratis sebagai upaya dalam memenuhi amanat UU Desa.	Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat	Deskriptif kualitatif dengan melakukan Pendampingan teknis terkait informasi yang diperlakukan dalam membangun dan mengelola Sistem Informasi Desa dan meliterasi penggunaan media.	Warga telah merintis upaya pengelolaan dan pengembangan SID sebagai salah satu amanat UU Desa dan warga juga telah menyepakati informasi apa saja yang mereka perlukan dan mengidentifikasi informasi penting lain yang perlu ada di SID.
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa	Untuk mengetahui pemanfaatn TIK di Desa dan mendukung kegiatan pemerintah desa terkait pelayanan kepada masyarakat, yang selama ini dianggap adanya kesenjangan digital antara kota dan desa.	Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis Jawa Barat.	Studi kasus dengan melakukan observasi dan wawancara.	Desa Panjalu sudah menggunakan TIK untuk berinteraksi dengan masyarakat, terutama untuk penyebaran berita-berita sehingga kebutuhan informasi masyarakat bisa terpenuhi.
4	Implementasi SIKADES (Sistem Informasi Kependudukan Desa) untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis	Untuk mengetahui kemudahan pelayanan Administrasi Desa setelah dibuatnya aplikasi berbasis web mobile.	Kecamatan Samigaluh dan sample penelitian di 2 desa dan 4 pedukuhan.	Waterfall, dimulai dengan pengumpulan data dan kebutuhan sistem.	Sudah dikembangkan SIKADES di Kecamatan Samigaluh dengan 2 Desa dan 4 Kelurahan. Hampir semua elemen menggunakan sistem ini mulai dari

	Web Mobile				Camat, Lurah, Dukuh, dan Warga. Sistem ini sudah diuji coba oleh programmer dan hasilnya sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Sistem ini dapat dikembangkan di daerah lain.
5	Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian	Menjelaskan tentang pengertian dan analisis pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian.	pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian.	evaluasi dan monitoring	terdapat jenis-jenis pemangku kepentingan salah satunya pemangku kepentingan pertama yaitu yang mempunyai peran secara signifikan dalam keberlangsungannya kegiatan atau program.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada identifikasi *stakeholder*, yang mana pada penelitian terdahulu tidak adanya identifikasi *stakeholder* dalam pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun dalam penelitian terdahulu ada yang mengidentifikasi *stakeholder* namun berbeda objek penelitian, untuk tema penelitian pemanfaatan teknologi informasi di pemerintah desa belum ada yang mengidentifikasi *stakeholder*. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi *stakeholder* dalam pemanfaatan teknologi informasi di pemerintah desa.

2. Kerangka Teori

a. Partisipasi

Partisipasi merupakan bagian dari komunikasi karena partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, di bimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Titik tolak dari partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar (Nadian 2006 dalam Isma Rosyida dan

Ferdian Tony Nasdian, Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Volume 05 2011: 53). Dalam partisipasi dibutuhkan komunikasi yang baik agar sesuai dengan tujuan.

Selain itu partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan, keikutsertaan ini sudah barang tentu disadari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh seseorang. Keikutsertaan yang secara aktif tersebut merupakan energy yang mendorong bergeraknya roda pembangunan atau kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan untuk memecahkan suatu masalah. (Taufik Hidayat dan Yoka Pramadi dalam Santoso, 2016:307).

Definisi lain dari partisipasi menurut Cohen dan Up Hoff menjelaskan bahwa “partisipasi itu merupakan keterlibatan nyata masyarakat dalam proses pembuatan keputusan mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Juga diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam menikmati hasil serta partisipasi dalam mengadakan evaluasi”. Maksudnya disini adalah masyarakat merupakan kunci utama yang harus dilibatkan secara totalitas sejak awal hingga akhir pelaksanaan. (Taufik Hidayat dan Yoka Pramadi dalam Santoso, 2016:308).

Partisipasi yang paling bagus dilihat dari segi keberlanjutannya bukan hanya memperhatikan keberhasilan dan hasil akhirnya saja. Karena dengan lebih menekankan proses akan lebih maksimal dari pada mengutamakan hasil akhir, dan jika lebih mementingkan hasil akhir maka biasanya tidak akan adanya keberlanjutan dari program tersebut.

Dalam partisipasi terdapat beberapa tahapan seperti yang dikemukakan oleh Cohen dan Up Hoff (dalam Tanjung, 2017) yaitu :

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, maksudnya adalah dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam mengambil keputusan pada perencanaan dan melaksanakan kegiatan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan atau implementasi, tahap ini merupakan tahap terpenting karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud partisipasi disini dibagi menjadi tiga golongan yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek

- c. Partisipasi dalam hasil, tahapan ini dijadikan sebagai indikator keberhasilan dari partisipasi masyarakat pada sebuah perancaan dan pelaksanaan. Selain itu dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat kegiatan yang dirasakan, berarti kegiatan tersebut tepat sasaran.
- d. Partisipasi dalam evaluasi, tahap ini juga dianggap penting karena partisipasi masyarakat disini menjadi feed back yang dapat memberi masukan untuk perbaikan dalam kegiatan selanjutnya.

Jadi partisipasi adalah bentuk keikutsertaan seseorang atau sekelompok dalam sebuah kegiatan dan juga ikut andil dalam kegiatan tersebut, diluar dari profesi dan keahliannya sendiri. Keterlibatan tersebut berupa mental, fisik dan emosi dalam melakukan segala kemampuan yang dimiliki. partisipasi telah terlaksana dan mencapai suatu pandangan yang sama sehingga hasilnya bisa dinilai. Dengan demikian partisipasi memang harus ada pada tahap perencanaan, implementasi, dan tahap evaluasi yang biasanya memng dilakukan secara bersama-sama di kehidupan bermasyarakat (Hetifah, 2009 : 159).

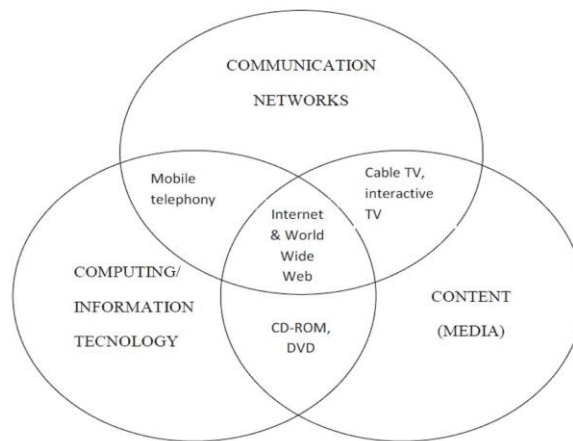
Dalam penelitian ini partisipasi merupakan elemen terpenting dalam terlaksananya program website desa di Desa Karangmojo dan juga Desa Putat, karena jika tidak ada partisipasi dari masyarakat maupun kelompok-kelompok terkait tidak akan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Bagaimana keterlibatan dan peran stakeholder dalam program Desa Broadband Terpadu di Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo dan Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogtakarta sehingga terciptanya sistem informasi desa yang sangat *up to date*.

b. New Media

Dampak dari perkembangan teknologi telah melahirkan *new media* sebagai teknologi baru digital. Pada dasarnya *new media* merupakan media-media lama yang terdigitalisasi dan terkoneksi dengan internet. Definisi *new media* adalah media yang lahir dari penggabungan teknik informatika, telekomunikasi dan audiovisual yang tersimpan dalam bentuk data digital dan dapat disebarluaskan melalui jaringan internet, *new media* ini kumpulan dari media-media lama yang berubah menjadi media digital dan semakin mudah untuk diakses dimana saja kapan saja karena terkoneksi dengan jaringan interent (Wolton, 2007: 343).

Namun Hingga saat ini belum ada yang secara khusus membahas tentang teori *new media*, disini peneliti akan menjelaskan pengertian *new media* secara umum dan mewakili semaksimal mungkin tentang karakteristik *new media*. *New Media* mempunyai ciri khas yang menandai, salah satunya yaitu interaktivitas (*interactivity*) yang merupakan kemampuan untuk memberikan respon balik bicara atau *talk-back* dengan pengguna (Rahmawati, Skripsi, 2016: 28). Dari penjelasan tersebut inti dari interaktivitas adalah adanya umpan balik dalam komunikasi dua arah. untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam bagan (*The three Cs of convergent media*) berikut

Tabel 1. *The three Cs of convergent media*



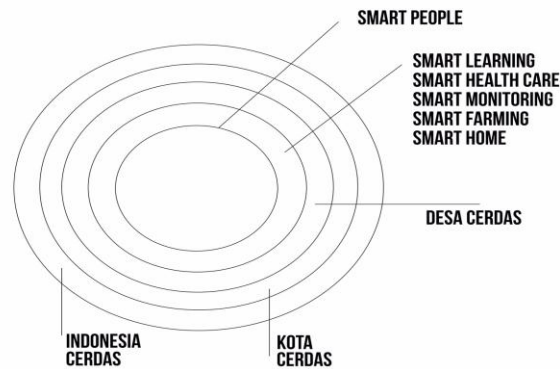
Sumber: *New media* (Flew, 2008: 3)

Pada bagan diatas dapat kita lihat bahwa internet merupakan sumber utama yang berperan sangat penting dalam *new media*, semua elemen di *new media* tersambung dengan jaringan interent sehingga saling terhubung antara elemen satu dengan yang lainnya. Internet sendiri posisinya berada di tengah-tengah bagan yang berarti sebagai sumber kekuatan dari *new media*.

New media ini berkaitan dengan *smart society for smart Indonesia* karena konsep dari *smart society for smart Indonesia* adalah memanfaatkan kecanggihhan dari *new media* untuk pembangunan daerah agar bisa terhubung dan dapat merasakan manfaat dari teknologi. Dalam dokumen layanan TIK dan pembangunan smart city, *smart Indonesia* merupakan Indonesia yang mengelola dan menggunakan sumber daya alam dengan efektif dan efisien dengan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi

sebagai sumber inovasi untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan lebih baik (Supangkat, 2015). Sebagai bahan ilustrasi sederhana berikut ini konsep *smart society for smart Indonesia*.

Tabel 2. konsep *smart society for smart Indonesia*.



Sumber: (Suhono, Supangkat, 2015).

Dari bagan tersebut telah dijelaskan bahwa Indonesia diharapkan kedepannya menjadi Negara yang bisa mengelola SDA,SDM, dan IPTEK sebagai sumber inovasi yang memanfaatkan kecanggihan dari teknologi. Untuk menjadikan Indonesia cerdas terdapat beberapa elemen yang tergabung yaitu mulai dari ekonomi cerdas yang terdiri dari pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, sumber daya, UKM. Yang kedua ada sosial cerdas yang terdiri dari kesehatan, keamanan, layanan publik, komunitas cerdas.

Terakhir adalah lingkungan cerdas yang terdiri energi, lingkungan, tata ruang dan air. Jika elemen tersebut sudah tertata maka akan terbentuk desa cerdas, kemudian merambah ke kota cerdas hingga ke level Indonesia cerdas.

Dalam penelitian ini, penggunaan sistem informasi desa berbasis website yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangmojo dan Desa Putat adalah salah satu wujud nyata dari *smart village* dimana desa tersebut sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi berbasis website untuk pelayanan desa. *New media* disini sangat mempengaruhi keberlangsungan sistem yang ada di dalam program website desa, karena seperti yang sudah di perlihatkan pada bagan di atas internet adalah pusat dari *new media* yang secara otomatis sangat mempengaruhi sistem tersebut agar bisa berjalan. Bagaimana keterlibatan dan peran *stakeholder* dalam program Desa Broadband Terpadu di Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo dan Desa Putat

Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga terciptanya sistem informasi desa yang sangat *up to date*.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan penelitian sosial yang memiliki tingkat kritis lebih tinggi dari semua proses penelitian, kritis disini menjadi dasar yang kuat dalam penelitian kualitatif (Bungin, 2007: 5). Desain yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian sosial yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi dan situasi maupun fenomena sosial yang ada di masyarakat (Bungin, 2007: 68).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, penelusuran data online dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan disini menggunakan gabungan teori media baru dan partisipasi, karena media baru berkaitan dengan website dan partisipasi berkaitan dengan keterlibatan stakeholder. Penelitian ini akan dilakukan lebih kurang 2 semester dan berlokasi di Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo dan Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sekretaris desa Karangmojo Budi Haryanto, Koordinator tim pengelola website desa Karangmojo Sutarto, perwakilan masyarakat desa Karangmojo Setyo Ahamd, KAUR Pemerintahan Desa Putat Endah Dwi Astuti, Koordinator tim pengelola website desa Putat Juni Putra Nugraha, perwakilan masyarakat Desa Putat Putri Setyaningsih, Staf Bappeda Aang Dwi Kuncoro, Staf Kominfo M. Setyo dan staf Combine Amrun Laksono.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Penelitian

A. Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta

Desa Karangmojo sendiri mulai aktif menggunakan website desa pada tahun 2016. Sedangkan mulai diberlakukannya sistem informasi desa berbasis website di Kabupaten Gunung Kidul sudah sejak tahun 2014. Namun setelah satu tahun mengelola website desa tersebut Desa Karangmojo menunjukkan konsistensinya dalam mengelola sehingga website desa Karangmojo menempati

trafik puncak selama beberapa bulan. Trafik tersebut dapat di akses di desa.gunungkidulkab.go.id

A.1 Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Secara keseluruhan pada tahun 2014 Kabupaten Gunung Kidul telah memberlakukan website desa sebagai sistem informasi desa, ini adalah wujud dari undang-undang desa tentang sistem informasi desa. Desa Karangmojo mulai aktif menggunakan website desa sebagai sistem informasi desa pada tahun 2016 tepatnya dua tahun setelah diberlakukannya website desa di Gunung Kidul. Berikut pernyataan yang diberikan pemerintah Desa Karangmojo

“Di Karangmojo sendiri mulai aktif menggunakan pada tahun 2016 itupun pertengahan jadi hampir dua setengah tahun ya.” (wawancara Budi, 25 September 2017).

Pernyataan pak Budi tersebut senada dengan tim pengelola website desa Karangmojo bahwa website desa di Karangmojo mulai aktif di gunakan pada tahun 2016.

Sedangkan menurut Amrun selaku staf Combine di Gunung Kidul sendiri sudah ada website sebagai sarana informasi desa sejak tahun 2008 tetapi hal tersebut masih perintisan belum terkelola dengan baik seperti sekarang ini

“Kalo dari merintis itu dari 2008 sampai sekarang ini 2017 lah, itu berarti protoripe sistemnya jadi 2009 itu uji cobanya jadi asumsikan pada tahun 2009 sampai dengan 2017 itu berarti berapa lama.” (Wawancara Amrun, 20 November 2017)

Prosesnya sendiri untuk mencapai seperti sekarang membutuhkan waktu 4 sampai 5 tahun, terlihat pada tahun 2011 terdapat 2 desa binaan combine yang menjadikan website sebagai sistem informasi desa dan pada tahun 2015 akhir diberlakukan wajib oleh Bappeda dan Kominfo untuk seluruh desa di Gunung Kidul menggunakan website sebagai sistem informasi desa

peran Kominfo disini masih sebatas tentang jaringan yang dibutuhkan terkait dengan kendala Kominfo belum bisa menangani sepenuhnya, karena jaringan yang dipakai di desa-desa Gunung Kidul masih mandiri, namun target dari Kominfo kedepanya jaringan akan diseragamkan dari pemerintah agar lebih stabil. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Setyo selaku Staf Kominfo

“Koordinasinya ya selama ini terus terang masih sendiri-sendiri tentang provider jadi kita belum bisa ikut andil jauh misal ada gangguan-gangguan. Insya Allah tahun-tahun berikutnya akan dihandle oleh Kominfo. Untuk koordinasi sendiri ya itu perwakilan-perwakilan dari 144 desa di Gunung Kidul biasanya operator dari tim

sid sering kita bikin pertemuan dan pelatihan tentang SID ini.”
(Wawancara Setyo, 20 November 2017)

Selama ini koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda dan *stakeholder* ke seluruh desa di Gunung Kidul dengan membuat *intervest* terkait website tersebut, jadi di pantau desa mana saja yang sering *update* dan tidak

*“Hmm... kalau untuk saat ini, kita bikin intervest terkait sama website, kalau di website kita punya intervest, untuk melihat seberapa sering desa itu mengupdate berita, kemudian kalau pas kita melakukan *pemuat akhiran* data kita punya juga monitoring, ada berapa sih desa melakukan pendataan subjeknya ada berapa rumah tangga begitu, itu juga ada monitoring. Selain itu kita kasih sama SEKDA, sama kecamatan bahwa prosesnya sama seperti ini. Kita tunjukkan langsung, sehingga kecamatan juga bisa memantau juga membantu. Jadi, cepat dan tidaknya desa itu melakukan update perkembangan website itu malah besar di kecamatan sih”* (wawancara Aang, 05 Januari 2018).

Di Karangmojo terdapat tim yang mengurus website desa, tim tersebut beranggotakan enam orang yang masing-masing mempunyai tugas dan peran yang berbeda. Dalam tim tersebut terdapat satu penanggung jawab, ada satu operator dan empat kontributor

“kita ada tim SID tim kita itu ada 1 penanggung jawab kemudian yang kedua itu ada perator kemudian yang ke tiga itu ada kontributornya naah kontributor ini kita ada empat orang jadi semua ada enam orang di tim kita itu.” (wawancara Budi, 25 September 2017).

Pernyataan tersebut sama halnya dengan yang diungkapkan oleh pak Tarto selaku Tim pengelola

“terdiri dari 3 bagian mas, satu itu adalah tim penanggung jawab biasanya sekretaris desa kalau di Karangmojo ya pak Budi ini, kemudian sebagai admin atau pengelola dan sebagai operator juga dan yang terakhir itu ada kontributor yang khusus menangani jurnalisme.” (wawancara Tarto, 5 Januari 2018).

Tidak ada persyaratan khusus yang dirancang oleh Bappeda untuk menjadi bagian dari tim tersebut, yang terpenting memiliki komitmen untuk menjadikan lebih baik

“Enggak sih enggak ada syarat yang penting punya komitmen mau ngembagin potensi desa, ya... kita ada yang namanya relawan, relawan pengembang. Itu anggota nya dari masyarakat, dari Pamong desa ada 19 orang. Ada KADESnya juga, KADES, SEKDES dan speerti itu. Jadi, kita memonitoring setiap kecamatan dari teman-teman pendamping website” (wawancara Aang, 05 Januari 2018)

Di Karangmojo tidak memerlukan strategi khusus untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait sistem informasi desa tersebut, karena hampir semua masyarakatnya sudah menggunakan smartphone dan telah membuat grup-grup whatsapp mulai dari RT sampai dengan padukuhan. Jadi untuk menyebarkan informasi tidak terlalu sulit dan memerlukan strategi khusus

“kalo di Karangmojo sendiri tidak susah mas karena hampir semua masyarakatnya itu memiliki smartphone ya itu di setiap RT di setiap padukuhan itu semua memiliki grup WA” (Budi, 25 September 2017).

Sedangkan menurut Tarto selaku tim pengelola program tersebut sosialisasi elemen terpenting untuk mengkomunikasikan program tersebut kepada masyarakat. Selain itu grup-grup sosial media antara perangkat hingga RT juga sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kabar terbaru dari Desa Karangmojo

“sosialisasi sih mas, kita lebih mensosialisasikan kepada warga bahwa proses administrasi di desa ini sudah berbasis online jadi bisa dilayani dengan waktu yang cepat dan lebih efisien dan alhamdulillah dari situ mereka menjadi lebih aktif mengakses website desa tersebut. Dan untuk lebih efektifnya lagi ketika ada berita-berita baru kita update masing-masing lewat grup WA mulai dari perangkat hingga RT kemudian menyebar ke warga-warga. Ini juga sangat efektif sekali ya karena persebaran informasi menjadi lebih cepat dan mudah.” (Wawancara Tarto, 5 Januari 2017)

Pelatihan tersebut berupa workshop yang melibatkan berbagai pihak seperti stakeholder yang ikut andil mengelola website desa tersebut. Bappeda rutin mengadakan pelatihan tersebut setahun sekali

“Iya, workshop dan juga pelatihan juga. Selain itu juga desa, mereka itu sudah punya dana sendiri dari dana desa itu. Ternyata, juga ada beberapa desa yang mengadakan pelatihan tapi mengundang baik dari KOMINFO atau Bappeda ataupun dari forum penamping. Kalau memang Bappeda bisa ya udah, tapi kalau enggak ya forum pendamping yang kesana” (wawancara Aang, 05 Januari 2018)

A.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya sendiri di Desa Karangmojo belum ada SOP yang mengatur tentang pengelolaan program tersebut, hanya sebatas kesadaran dan kebiasaan tim pengelola dan juga pemerintah desa, sesuai dengan pernyataan Budi selaku staf pemerintah desa Karangmojo

“Kalo SOP kita belum punya cuman gini eee kalo secara tertulis kita enggak punya tapi etikanya itu semua berita itu harus melalui eee apa redaksi penanggung jawab lah istilahnya berita apapun yang masuk itu harus melalui di eee apa itu penanggung jawab dulu apakah nanti

akan di eeee publish atau tidak gitu.” (Wawancara Budi, 25 September 2017)

Berbeda halnya dengan Kominfo, di Kominfo terdapat SOP yang mengatur terkait program tersebut meskipun SOP tersebut ditentukan oleh Kominfo pusat hal tersebut sesuai dengan pernyataan Setyo selaku staf Kominfo Gunung Kidul

“Kalo SOP itu yang membuat dari pusat kita hanya menjalankan saja ya, tapi ya ada SOP yang mengatur program ini kaya kalo mau bayar kemana itu ada juga di SOP tersebut.” (Wawancara Setyo, 20 November 2017) masyarakat.” (wawancara Setyo, 20 November 2017).

Bagi Combine sendiri data-data menjadi tersimpan lebih rapi, karena selama ini hanya pemerintah pusat yang mempunyai backup data dan tidak semua orang bisa mengakses namun dengan adanya program ini jadi lebih terbuka dan semua orang bisa mengaksesnya

“Kalau bagi combine setidaknya itu menjadi setidaknya desa mempunyai sebuah sistem yang bisa menyimpan data, karena selama ini data hanya tersimpan di pusat tetapi sekarang ini tidak setiap desa memiliki datanya masing-masing. Kemudian akan lebih terbuka dalam hal informasi jadi terlihat transparan, kalau yang dirasakan masyarakat silahkan tanya ke desanya masing-masing manfaatnya seperti apa setelah adanya sistem informasi desa yang berbasis website tersebut.” (Wawancara Amrun, 20 November 2017).

Disini dapat kita lihat bahwa pemerintah Desa Karangmojo sangat mendukung program tersebut, bahkan waraga yang menjadi relawan sebagai jurnalis warga mendapatkan anggaran rutin setiap berita yang disetor kepada tim pengelola website

*“Kalau berita ada ya bu ya, (ada) kalau kita ngirim berita itu ada, ada honor nya pasti ada. Tapi kan hitungannya perberita mas. Kemudian untuk pendataan ya megaitkan data itu kita juga ada itu kan setahun sekali, itukan melibatkan kader masyarakat semua, kemarin yang program *kis* itu *kis* itu salah satunya kemudian PKH itu kan ada pendataan ulang toh” (wawancara Setyo Ahmad, 05 Januari 2018)*

Keterlibatan masyarakat dalam program tersebut adalah sebagai penikmat dan pemantau program, jika dirasa ada yang kurang pas maka masyarakat bebas mengeluarkan pendapat lewat kolom komen yang telah disediakan yang nantinya bisa untuk menjadi bahan evaluasi

*“Program *SID* yo kalau mengawasi enggak mngawasi mas aktif lah, aktif mengakses, nah kalau ngawasi itu kan kesannya gimana gitu kan, kalau aktif kita iya, tapi kalau mengawasi ya enggak, aktif aja” (wawancara Setyo Ahmad, 05 Januari 2018)*

A.3 Partisipasi dalam Hasil

Target dari desa Karangmojo untuk program website tersebut adalah yang pertama website bisa menjadi sumber perencanaan untuk kemajuan desa agar semua pembangunan sesuai dengan data yang valid dan tepat sasaran.

“yang paling pokok adalah satu bagaimana website desa ini menjadi apa ya istilahnya sumber perencanaan untuk kemajuan desa seperti yang saya katakan tadi seperti ada disana informasi data, bagaimana setiap pembangunan itu sesuai data agar lebih benar-benar tepat sasaran dan mempermudah kinerja perangkat desa sendiri, yang menjadi beban buat saya ya bagaimana pelaku kebijakan dalam mengambil data-data itu untuk mengambil kebijakan di desa baik pembangunan, kaya sosial kemasyarakatan ataupun sebagainya ini yang menjadi target kita.” (Wawancara Budi, 25 September 2017).

Untuk ukuran sukses di Desa Karangmojo sendiri jika semua program berjalan dengan baik seperti jurnalisme saat ini warga mulai aktif dan peka terhadap lingkungan sehingga Karangmojo tidak kekurangan informasi, dari segi pelayanan administrasi di Karangmojo sudah sangat berubah dan bisa dilayani dengan sangat cepat dan yang terakhir dari segi pendataan dengan adanya program ini data-data lebih valid dan akurat jadi kalau semua elemen sudah terpenuhi Karangmojo akan lebih sejahtera.

Target sukses program tersebut menurut Bappeda adalah lebih terkelolanya dengan baik website desa tersebut, selain itu update informasi data juga tetap harus dipantau karena bisa mempermudah kinerja pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan misalnya

“Bappeda sendiri ya terutama kita penanggulangan kemiskinan satu, kedua terkait sama pemerataan baik itu akses informasi, akses fasilitas umum, kemudian masyarakat itu sudah tidak gagap lagi terhadap teknologi itu yang kita inginkan. Jadi datanya dari desa kita gunakan intervensi untuk baik penanggulangan kemiskinan, karena penanggulangan kemiskinan kan luas bukan hanya kita beri subsidi, kita kasih bangun rumah kasih jaminan kan tidak, mereka juga melihat sebenarnya orang yang miskin disitu ada siapa saja, bisa kita apakan saja gitukan. Program-program disitu bisa kita susun, jadi enggak hanya yang sudah miskin yang hampir miskin, yang mau miskin itu jangan sampai miskin” (wawancara Aang, 05 Januari 2018)

Masyarakat sendiripun tidak muluk-muluk dengan adanya pelayanan yang semakin mudah khususnya dengan surat menyurat sangat membantu masyarakat dan harapan kedepannya website tersebut semakin dikembangkan sehingga dapat membantu perekonomian desa

*“Ya pengen seperti dibilang pak SEKDES tadi misal warga itu kalau mau *nyaranin* tinggal ke pak dukuh, kesini kita tinggal tanda tangan, kan lebih enak lah mas” (wawancara Setyo Ahmad, 05 Januari 2018)*

Dampak yang sangat dirasakan sejauh ini adalah semakin dikenalnya Gunung Kidul, selain itu proses administrasi desa juga semakin mudah dan secara lambat laun perekonomian desa juga sudah mulai terbantu dengan adanya website desa tersebut

“Yang pasti semakin terkenal Gunung Kidul, (tertawa) itu kemudian e... desa-desa banyak yang mendapatkan kemudahan terkait dengan pelayanan administrasi mereka juga semakin tertata, karena kalau hanya visi saja mereka ngetik surat arsip nya mungkin hanya dari sisi kertas. Nanti semakin banyak kertas membutuhkan ruang untuk sistem arsiparisnya jadi lebih tertata. Sewaktu-waktu kita mau ngambilkan lebih enak” (wawancara Aang, 05 Januari 2018)

A.4 Partisipasi dalam Evaluasi

Di Desa Karangmojo tidak ada kendala dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring program tersebut, mulai dari pelaksana yang melaksanakan dan yang mengawasi adalah pemerintah desa itu sendiri sehingga tidak ada kendala yang berarti hal itu disebabkan karena adanya koordinasi yang terus terjalin.

“Kita pelaksana yang melaksanakan kita, yang mengawasi kita berarti tidak ada masalah berarti”, (Wawancara Budi, 25 September 2017).

Kendala lainnya adalah lebih ke masalah teknis seperti jaringan, listrik dan hal-hal teknis lainnya, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tarto selaku tim pengelola program

“Kendalanya ya soal jaringan itu tadi, kemudian kalo listriknya padam karena kita berbasis online ya jadi itu sangat-sangat mempengaruhi jadi ya saya kira masalah teknis aja ya mas.” (Wawancara Tarto, 05 Januari 2018).

Sedangkan menurut Setyo selaku staf Kominfo kendala yang cukup berarti adalah geografis yang mana membedakan kecepatan internet setiap daerah

“Kalo kendala infrastruktur itu rata-rata kendala geografis yang membedakan kecepatan akses internet. Kalau kendala yang lain itu lebih ke SDM karena masih banyak yang sepuh-sepuh itu tadi.” (Wawancara Setyo, 20 November 2017).

Masih terdapat banyak kendala dalam program tersebut salah satunya adalah SDM, karena jika program sudah sangat bagus tetapi SDMnya tidak mempunyai maka tidak akan bertahan lama program tersebut

“Kendalanya banyak mas, ya salah satunya mendorong desa untuk membentuk tim itu susah banget ya katakanlah SDMnya lah ya mas yang masih kurang. Sebenarnya SDMnya ada tetapi bagaimana

*orang-orang yang di depan ini mau merekrut orang-orang tersebut.”
(Wawancara Amrun, 20 November 2017).*

B. Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tahun 2015 Desa Putat sudah mulai aktif mengelola website desa, meskipun pada tahun 2014 sudah mulai melakukan sosialisasi terkait website tersebut. Secara keseluruhan di Gunung Kidul mewajibkan semua desa memiliki website yang kemudian dikontrol langsung oleh pihak kabupaten yang mana peraturan tersebut mulai diberlakukan pada tahun 2014. Namun karena berbagai hal rata-rata desa di Gunung Kidul mulai aktif mengelola yaitu satu sampai dua tahun setelahnya. Desa Putat sendiri juga menempati posisi tiga paling atas dalam trafik kabupaten yang bisa diakses di desa.gunungkidulkab.go.id

B.1 Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Desa Putat mulai aktif mengelola website desa tersebut pada tahun 2015. Namun pada tahun 2014 telah ada sosialisasi dari idea dan combine tetapi mulai aktif dan dikelola dengan serius pada tahun 2015 akhir.

Pak Juni selaku tim pengelola website desa Putat yang menyatakan di Desa Putat mulai mengelola website pada tahun 2015 tepatnya 2015 akhir.

“2015. Tahun 2015 akhir.” (Wawancara Juni, 05 Januari 2018)

Selain itu Pak Setyo dari Kominfo Gunung Kidul juga menyatakan

Sejak launching SID pada tahun 2014, namun baru benar-benar terurus itu awal tahun ini tahun 2017. Sebenarnya pertama kali di Gunung Kidul terdapat 2 desa yang menggunakan website desa sebagai sistem informasi desa (wawancara Setyo, 20 November 2017).

Menurut mas Aang selaku staf Bappeda bagian SID Gunung Kidul bahwasanya di Gunung Kidul sendiri mulai diwajibkan seluruh desa Gunung Kidul menjadikan website sebagai sistem informasi desa pada tahun 2015 akhir, Launchingnya sendiri bertepatan dengan hari jadi Gunung Kidul jadi ini adalah gebrakan baru untuk menjadikan Gunung Kidul menjadi lebih baik

“Mewajibkannya, itu mulai 2015 akhir, Cuma memang sejarahnya kan website desa e... apa pengembangan awal sih bukan ke website dulu itu terkait data nya. Itu mulainya dari 2011 kalau data. Itu juga berbasis web, terus itu yang pertama itu dulu 2 kecamatan, namanya Patuk, kecamatan Patuk sama kecamatan Panggang dari 2011 sampai 2015. Nah 2015 akhir kita buat kerjasama sama Kominfo enggak Bappeda sendiri. Kominfo daftarin domain desa di desa.id itu 154, kemudian loncing, tapi sebenarnya udah jalan sih, loncingnya itu

di tanggal 27 Mei pas hari jadi Gunung Kidul itu pas disitu kita loncingan website desa” (wawancara Aang, 05 Januari 2018)

Kominfo ikut berperan dalam website desa tersebut, dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi namun setahun satu sampai dua kali. Selain itu kominfo juga memberikan fasilitas internet dan subsidi domain sehingga bayar domainnya lebih murah. Dalam hal ini Combine juga ikut mensosialisasikan tentang website tersebut.

“Kalo jarak waktunya segitu sepertinya ga ada. Mungkin setahun sekali dari kombine. Terus waktu itu penyelenggaranya kominfo sama kayak fasilitas internetnya dari kominfo kok dan untuk pembayaran kan kalau ga ada subsidi kan lebih mahal. Tapi kan ada subsidi dari kominfo kan jadi lebih ringan pembayarannya kita. Selanjutnya tadi kayak sosialisasi itu ada tapi rentang waktunya ga ada dan frekuensinya ga ada yang sebulan sekali atau seminggu sekali ga ada cuma setahun sekali itu ada” (wawancara Endah, 25 September 2017).

Desa Putat sendiri sudah pernah melakukan pelatihan jurnalis kepada warganya, semua masyarakatnya mengikuti kegiatan tersebut mulai dari karang taruna, PKK, tokoh-tokoh masyarakat dan semua masyarakat Desa Putat. Meskipun belum rutin dilakukan tetapi dalam setahun terakhir ini sudah dua kali dilakukan.

“udah pernah ada pelatihan jurnalis semua masyarakat mulai dari karang taruna, pkk terus tokoh tokoh gitu kita ada ini pelatihan jurnalis. Kita ada 2 kali seingat saya” (wawancara Endah, 25 September 2017).

B.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan

Desa putat belum memberlakukan SOP untuk pengelolaan website desa, namun ada tim pengelola yang diberikan wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan jabatannya. Misalnya Jurnalis mencari berita, admin melayani secara online pengunjung website dan lain sebagainya.

“Sementara ini belum, cuma ada apa kriteria-kriteria yang, ini jabatan administrator itu wewenangnya bisa seperti demikian demikian, kalau operator wewenang dan haknya demikian demikian. Kalo yang jurnalis itu dia bisa mencari data atau berita gitu” (wawancara Endah, 25 September 2017).

Penanggung jawab dari Bappeda terkait dengan program tersebut adalah Pemerintah Kabupaten yang memegang kendala, namun pada dasarnya runtut dari desa, stakeholder, hingga pemerintah ikut andil dan bertanggung jawab dengan program tersebut

“Ya kita dari bawah... desa sendiri juga ada, dari kecamatan juga ada, di desa itu ada namanya TKPKAD, kemudian juga desa mengangkat adminnya, kemudian juga ada operatornya juga jadi admin dengan operator itu beda. Kemudian, yang untuk update

beritanya itu ada jurnalisme warganya, jurnalisme-jurnalisme itu, sama kontributor juga ada dari beberapa dusun itu kan yang memerlukan em.. memberikan kita perkembangan. Nah kecamatan itu sudah dikasih yang terkait sama data. Kemudian, pemerintahan, pakemnya itu terkait dengan anggaran sampe ke Bapeda eh kabupaten, kabupaten itu ada Bapeda sekertariat TKPKDnya yang kabupaten. Kominfo juga sering melakukan pelatihan. Kalau kominfo memang banyak berkaitan dengan web” (wawancara Aang, 05 Januari 2018)

Masyarakat juga ikut andil dan bertanggungjawab dalam program tersebut, karena partisipasi masyarakat disini sangat dibutuhkan untuk menjalankan dan mensukseskan program tersebut, harus ada koordinasi agar kerjasama yang di jalin berbagai pihak bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan pernyataan Sinta salah satu warga desa Putat

“Kalau menurut saya sebagai yang mewakili ya, sebenarnya penting mas, soalnya apa, informasi yang ada di website itu kan kita ambil dari masyarakat ya kan, kalau misalkan masyarakat tidak berpartisipasi kita juga enggak mungkin dapat gitu” (wawancara Sinta, 05 Januari 2018)

Website desa tersebut sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah desa Putat, karena merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang desa dan prinsip dari pemerintah desa adalah transparansinya semua informasi yang berkaitan dengan desa

“Menurut saya penting sekali karena ya itu tadi salah satu untuk implementasi dari undang-undang desa prinsip dari pemerintahan kan apa transparansinya kan kita wujudkan dari salah satunya dari website desa selanjutnya untuk meningkatkan promosi itu tadi. Banyak pokonya kalo menurut saya” (wawancara Endah, 25 September 2017).

B1.3 Partisipasi dalam Hasil

Target untuk kemajuan Desa Putat melalui website desa sebagai sarana informasi desa salah satunya adalah agar lebih bisa dimanfaatkan dan kemudahannya bisa digunakan oleh masyarakat secara luas. Sesuai dengan pernyataan Juni selaku tim pengelola sistem informasi Desa Putat

“Kalau sesuai dengan tujuannya itu adalah untuk mempercepat pelayanan surat menyurat kepada masyarakat dan juga untuk memberikan informasi masyarakat yang seluas-luasnya. Kendalanya memang saat ini desa Putat belum bisa optimal dalam memanfaatkan pelayanan surat menyurat, karena nuwun sewu SDM di tingkat desa itu bermacam-macam. Ada yang masih mudah tapi untuk belajar males untuk mengikuti teknologi males. Tahunya selfie upload

instagram giliran untuk memanfaatkan teknologi ngajarinnya aja susah gitu” (wawancara Juni, 05 Januari 2018)

Dampak yang sangat dirasakan sejauh ini adalah semakin dikenalnya Gunung Kidul, selain itu proses administrasi desa juga semakin mudah dan seacra lambat laun perkonomian desa juga sudah mulai terbantu dengan adanya website desa tersebut

Yang pasti semakin terkenal Gunung Kidul, (tertawa) itu kemudian e... desa-desa banyak yang mendapatkan kemudahan terkait dengan pelayanan.administrasi mereka juga semakin tertata, karena kalau hanya visi saja mereka ngetik surat arsip nya mungkin hanya dari sisi kertas. Nanti semakin banyak kertas membutuhkan ruang untuk sistem arsiparisnya jadi lebih tertata. Sewaktu-waktu kita mau ngambilkan lebih enak” (wawancara Aang, 05 Januari 2018) 25 September 2017).

B1.3 Partisipasi dalam Evaluasi

Evaluasi di Desa Putat dilaksanakan setahun sekali dengan membuat laporan kinerja kemudian di kumpulkan ke kepala desa. Dengan laporan tersebut akan terlihat target mana saja yang belum tercapai dan lain sebagainya, sehingga lebih jelas dan mudah dalam mengevaluasinya

“Ya itu ada ketika kita membuat laporan. Setahun sekali” (wawancara Endah, 25 September 2017).

Dalam hal ini Kominfo hanya sebatas penyedia jaringan, jadi tidak berhak dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring program tersebut, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Setyo selaku staf Kominfo Gunung Kidul

“Kalo SID itu Kominfo perannya lebih ke penyediaan server kalo untuk konten dan sebagainya itu adalah wewenang Bappeda. Jadi untuk monitoring mengevaluasi dan sebagainya itu adalah urusan dari Bappeda. Keterlibatan kami di Kominfo hanya sebatas penyediaan infrastruktur TIKnya.” (Wawancara Setyo, 20 November 2017).

Sementara itu menurut Amrun selaku staf Combine, untuk sekarang ini sudah bekerja sama dengan Bappeda dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul jadi lebih mudah dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring program tersebut

“Kalau khusus di Gunung Kidul kita sekarang sudah bekerjasama dengan temen-temen Bappeda mas, Pemda juga ikut andil dalam masalah ini.” (Wawancara Amrun, 20 November 2017). akan ya sayang to mas.” (Wawancara Amrun, 20 Januari 2018).

2. Pembahasan

Dalam bagian ini berisikan pembahasan dari hasil penelitian mengenai analisis keterlibatan *stakeholder* dalam program desa broadband terpadu di Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo dan Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kajian analisis keterlibatan dan peran stakeholder dalam program desa broadband terpadu di Desa Karangmojo dan Desa Putat ini dilakukan dengan menggunakan konsep partisipasi yang mempunyai 4 tahapan yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan partisipasi dalam hasil dan partisipasi dalam evaluasi. Selain itu juga terdapat faktor pendukung dan penghambat untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan program tersebut dan yang terakhir adalah *new media* dalam keterlibatan dan peran *stakeholder* dalam program desa broadband terpadu di Desa Karangmojo dan Desa Putat Gunung Kidul.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara, latar belakang dalam proses analisis situasi dalam mengidentifikasi masalah mengenai peran dan keterlibatan stakeholder di Desa Karangmojo dan Desa Putat yang memilih website sebagai sistem informasi desa dan dianggap lebih menarik dan efisien oleh pemerintah maupun masyarakat Desa Karangmojo dan Desa Putat.

Alasan tersebut didukung dengan zaman sekarang yang tidak bisa lepas dengan internet yang didukung dengan KemKominformasi yang membuat program Desa Broadband terpadu untuk melengkapi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan memberikan 1000 domain gratis yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh desa di Indonesia sebagai langkah awal keterbukaan informasi yang sesuai dengan UU Desa tahun 2014.

Menurut Cohen dan Up Phoff (dalam Tanjung,2017) disini partisipasi dalam pengambilan keputusan maksudnya adalah dengan adanya keikutsertaan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan pada perencanaan dan pengambilan keputusan. Maksudnya disini adalah setiap yang berkepentingan pada program tersebut baik mulai dari masyarakat hingga stakeholder berhak diikutsertakan dalam mengambil keputusan pada tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya sendiri baik Desa Karangmojo maupun Desa Putat sejauh ini bisa dibilang sukses, terlihat dengan usaha dan kegigihannya serta kerja kerasnya selama 2 tahun belakangan ini yang kemudian menghasilkan peringkat pertama dan kedua desa teraktif dan terupdate dari 144 desa yang ada di Gunung Kidul.

Namun selama ini belum ada SOP yang mengatur tentang kinerja pengelolaan website tersebut, baik di Desa Karangmojo maupun di Desa Putat. Lingkup pemerintahan seperti Bappeda juga belum ada SOP yang mengatur kinerja pengelolaan website tersebut, karena program tersebut masih dianggap baru dan dirintis secara bersama-sama.

Berbeda halnya dengan Kemkominfo dan Combine yang sudah mempunyai SOP untuk mengatur kinerja pengelolaan website tersebut, karena dianggap SOP salah satu hal penting yang harus dimiliki untuk menjadi pedoman secara tulisan agar yang memiliki kepentingan patuh terhadap standar yang telah diberikan.

Menurut Cohen dan Up Phoff (dalam Tanjung, 2017) partisipasi dalam pelaksanaan merupakan tahapan yang paling penting, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud partisipasi disini dibagi menjadi tiga golongan yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.

3. Partisipasi dalam hasil

2 tahun keblekangan ini Desa Karangmojo dan Desa Putat bisa dibilang sukses mengelola website desa tersebut. Terbukti dengan secara konsisten dari tahun 2016 Desa Karangmojo tetap mempertahankan posisi pertama dari 144 desa yang ada di Gunung Kidul. Sedangkan meskipun naik turun Desa Putat berhasil menduduki posisi kedua dari seluruh desa tersebut.

Meskipun demikian kedua desa tersebut tidak cepat puas diri, pencapaian tersebut dianggap bonus dari kerja kerasnya selama ini. Target suksesnya website desa Karangmojo sendiri adalah website tersebut bisa menjadi sumber perencanaan untuk kemajuan desa agar semua pembangunan sesuai dengan data yang valid dan tepat sasaran, memenuhi kebutuhan informasi masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat desa tersebut menjadi jurnalis warga dan yang terakhir dengan adanya program ini data-data lebih valid dan akurat jadi kalau semua elemen sudah terpenuhi Karangmojo akan lebih sejahtera.

Sedangkan target sukses dari Desa Putat adalah sebagai sarana informasi desa salah satunya adalah agar lebih bisa dimanfaatkan dan kemudahannya bisa digunakan oleh masyarakat secara luas. Optimalisasi jaringan juga merupakan target sukses untuk mendukung program tersebut dari Kemkominfo, mengingat jaringan merupakan kunci utama dari program tersebut. Tahun 2020 di seluruh desa Gunung Kidul ditargetkan oleh Kemkominfo sudah menggunakan jaringan fiber yang mana agar lebih kuat dan stabil internet di Gunung Kidul.

Keterbukaan informasi publik dan tidak adanya gap antarpihak juga merupakan target suksesnya combine untuk program tersebut, karena sesuai dengan UU Desa tahun 2014 tujuan dibentuknya informasi desa adalah agar lebih terbuka keseluruh khalayak. Masyarakat desapun berharap pelayanan yang semakin mudah khususnya dengan surat menyurat sangat membantu masyarakat dan harapan kedepannya website tersebut semakin dikembangkan sehingga dapat membantu perekonomian desa.

Menurut Cohen dan Up Phoff (dalam Tanjung, 2017) Partisipasi dalam hasil adalah faktor penentu dari keberhasilan sebuah program yang dijalankan, tahapan ini dijadikan sebagai indikator keberhasilan dari partisipasi masyarakat pada sebuah perancah dan pelaksanaan. Selain itu dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat kegiatan yang dirasakan, berarti kegiatan tersebut tepat sasaran.

1. Partisipasi dalam Evaluasi

Di Desa Karangmojo tidak ada kendala dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring program tersebut, mulai dari pelaksana yang melaksanakan dan yang mengawasi adalah pemerintah desa itu sendiri sehingga tidak ada kendala yang berarti hal itu disebabkan karena adanya koordinasi yang terus terjalin. Sedangkan Evaluasi di Desa Putat dilaksanakan setahun sekali dengan membuat laporan kinerja kemudian di kumpulkan ke kepala desa.

Dengan laporan tersebut akan terlihat target mana saja yang belum tercapai dan lain sebagainya, sehingga lebih jelas dan mudah dalam mengevaluasinya. Dalam hal ini Kemkominfo hanya sebatas penyedia jaringan, sehingga tidak berhak ikut andil dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring program tersebut.

Tidak ada laporan rutin di Desa Sidorejo, karena laporan tersebut dilakukan setiap hari. Hanya saja terdapat pembaruan data setiap satu tahun sekali yang dilakukan pada bulan Oktober. Demikian juga Desa Putat, tidak ada laporan khusus terkait kinerja program hanya saja pembaruan data yang dilakukan setiap satu tahun sekali.

Menurut Cohen dan Up Phoff (dalam Tanjung, 2017) Partisipasi dalam evaluasi adalah tahapan untuk mengukur keberhasilan dari program dan melihat *feed back* yang diberikan oleh masyarakat. Tahap ini juga dianggap penting karena partisipasi masyarakat disini menjadi *feed back* yang dapat memberi masukan untuk perbaikan dalam kegiatan selanjutnya.

Dalam tahap hasil ini jaringan komunikasi masuk kedalam tahapan ini. Sesuai yang telah dikemukakan oleh Terry Flew (2008) yang masuk dalam komponen The Three C's Of Convergent Media. Jaringan komunikasi yang terhubung dengan Desa Karangmojo dan Desa Putat adalah pemangku kepentingan yang ikut andil dalam mengelola website desa di Gunung Kidul, pemangku kepentingan yang ikut andil diantaranya tim pengelola website Desa Karangmojo dan Desa Putat, Pemerintah desa, Bappeda, Kemkominfo dan juga Combine.

Dalam hal ini menurut Muliana (dalam Santoso, 2016) kehadiran media baru tidak terlepas dari disahkannya UU Telekomunikasi tahun 1999. UU tersebut juga membuka peluang bagi swasta untuk masuk dan berpartisipasi dalam sistem telekomunikasi Indonesia, selain itu juga terdapat NGO yang bisa ikut membantu penyempurnaan kekurangan yang terjadi.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan setelah dilakukan analisis yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang akan dijabarkan sebagai berikut :

- i. *Stakeholder* yang terlibat dalam program Desa Broadband Terpadu di Desa Karangmojo dan Desa Putat dalam mengelola website desa sehingga menjadi website desa teraktif pada periode 2015 hingga 2018 diantaranya adalah tim pengurus website Desa Karangmojo dan Desa Putat, pemerintah desa, Kominfo, Combine, Bappeda, dan juga perwakilan masyarakat yang ikut andil

mensukseskan program tersebut sehingga kedua desa tersebut berhasil menduduki 3 besar website desa terbaik di Gunung Kidul.

ii. Dalam hal ini keterlibatan *stakeholder* di Desa Karangmojo dan Desa Putat terbagi menjadi empat tahapan yaitu :

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Dalam tahapan ini *stakeholder* yang terlibat adalah pemerintah desa, tim pengelola website desa, Bappeda Kominfo dan juga Combine. Keterlibatannya adalah membuat program, mewajibkan program tersebut, menyetujui dan mengikuti peraturan yang telah diterapkan dan menjadi pengembang program.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Dalam tahapan ini *stakeholder* yang terlibat adalah pemerintah desa, tim pengelola website desa, masyarakat desa, Bappeda, Kominfo dan juga Combine. Keterlibatannya adalah melaksanakan peraturan yang telah diterapkan, membentuk tim pengelola dan menjadi pemantau program tersebut.

c. Partisipasi dalam menikmati hasil

Dalam tahapan ini *stakeholder* yang terlibat adalah pemerintah desa, tim pengelola website desa, masyarakat desa, Bappeda, Kominfo dan juga Combine. Keterlibatannya adalah mencapai posisi 3 besar teratas dari 144 desa yang ada di Gunung Kidul dan ikut merasakan dampak positif dari program tersebut.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Dalam tahapan ini *stakeholder* yang terlibat adalah pemerintah desa, tim pengelola website desa, masyarakat desa, Bappeda, Kominfo dan juga Combine. Keterlibatannya adalah terdapat evaluasi yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali dan ikut memberikan komentar terkait program yang nantinya akan dibahas dievaluasi tahunan.

A. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tentunya terdapat keterbatasan dan hambatan yang dilalui oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Adapun keterbatasan dan hambatan yang dimaksud yaitu kurangnya bahan literatur karena penelitian ini tergolong baru, yang mengakibatkan kurang dalam pembahasan dan analisis dari penelitian tersebut. Penelitian ini hanya sebatas menganalisis keterlibatan pemangku kepentingan yang mana untuk penelitian selanjutnya diharapkan keterbatasan penelitian ini dapat dikembangkan lebih dalam lagi.

B. Saran

- a. Untuk penelitian selanjutnya, apabila akan melakukan penelitian dengan tema serupa, dapat melakukan pengembangan atau memperdalam analisis dari data yang telah ditemukan dengan memperdalam teori yang digunakan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat berfokus pada bagaimana koordinasi dan peran yang dilakukan *stakeholder* dalam mengelola program tersebut.
- b. Untuk Desa Karangmojo dan Desa Putat. Sejauh ini pengelolaan program di Desa Karangmojo dan Desa Putat sudah sangat bagus sehingga menempati posisi pertama dan kedua se Gunung Kidul. Namun ada beberapa saran dari peneliti untuk Desa Karangmojo diantaranya adalah lebih mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi seperti dilibatkannya karang taruna sebagai tim pengelola website, lebih gencar melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat secara *door to door* agar semua masyarakat Desa Karangmojo bisa menikmati program tersebut. Sedangkan untuk Desa Putat membuat target unggah berita di website agar tidak semakin tertinggal dengan desa-desa lain dan dapat meningkatkan prestasinya, lebih mengajak masyarakat seperti karang taruna untuk terlibat dalam tim pengelola dan lebih gencar mensosialisasikan ke masyarakat dengan *door to door* agar program semakin maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dilla, Sumadi. (2007). *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Fleww, Terry. (2008). *New Media an introduction 3rd edition*. Oxford: Oxford press.
- Harun, Rochajat & Elvinaro Ardianto. (2012). *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Idris, Hedi M, et.al. (2015). *Komunikasi dan Informatika Buku Putih 2015*. Jakarta: Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Komunikasi dan Informatika.
- Kriyantono, Rachmat. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Rleations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kumolo, Tjahjo. (2017). *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Santoso, Widjianto Mulyono. (2016). *Ilmu Sosial di Indonesia Perkembangan dan Tantangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siagian, Sondang P. (1981). *Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Soeparmo, R.(1977). *Mengenal Desa Gerak dan Pengelolaannya*. Bogor: PT Intermasa.
- Solekhan, Moch. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, Sj. Hetifah . (2009). *Inovasi, Patisipasi, dan Good Governence*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Wolton, Domique.(2007). *Kritik atas teori komunikasi kajian dari media konvensional hingga era internet*, terj. Ninik Rochani Sjams. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

JURNAL :

- Sumekar Tanjung, "Local Community Participation In the Village Website Development In Gianyar Bali". "*International Journal of Social Sciences*" , Volume 03 (2017), hal. 1859.

<http://grdspublishing.org/> akses tanggal 20 Maret 2018

- Badri, Muhammad. "Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (studi pada Gerakan Desa Membangun)," *Jurnal Risalah*, Volume

- 27 (Desember,2016), hal. 62-73. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/risalah/article/download/2514/1594> akses tanggal 20 April 2017
- Hartoyo, Nunik Maharani, Ika Merdekawati. “Citalinuabdi: Upaya Membangun Sistem Informasi Desa yang Bermakna,” *Jurnal Komunikasi*, Volume 01 (2016), hal. 48-57. <http://dx.doi.org/10.25008/jkiski.v1i1.35> akses tanggal 20 April 2017
- Praditya, Didit. “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa,” *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Volume 17 (Desember,2014), hal. 129-140. <http://bppkibandung.id/index.php/jpk/article/download/12/14> akses tanggal 20 April 2017
- Noviyanto, Fiftin, Tedy Setiadi, Iis Wahyuningsih. “Implementasi SIKADES (Sistem Informasi Kependudukan Desa) untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa berbasis *Web Mobile*,” *Jurnal Informatika*, Volume 8 (Januari, 2014), hal. 858-869. <http://journal.uad.ac.id/index.php/JIFO/article/view/2084> akses tanggal 20 April 2017
- Rosyida, Isma dan Ferdian Tony Nasdian. “Partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan dampaknya terhadap komunitas perdesaan”, “*Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*”, Volume 05 (2011), hal. 57-70. <http://jurnal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/viewFile/5832/4497> akses tanggal 20 Maret 2018
- Hadiyanto. 2008. “Komunikasi Pembangunan Partisipatif: Sebuah Pendekatan Awal”, “*Jurnal Komunikai Pembangunan*”. Volume 06 (2008), hal. 81-88. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/viewFile/5670/4301> akses tanggal 20 Maret 2018
- Iqbal, Muhammad. “Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian,” *Jurnal Litbang Pertanian*, Volume 26 (2007), hal 89-99. <http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/p3263071.pdf> akses tanggal 20 April 2017

SKRIPSI:

Rahmawati, Dewi. (2016). "Pemilihan dan Pemanfaatan Instagram sebagai Media Komunikasi Pemasaran *Online* (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Akun Instagram @FreezyBrowniezz)." Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

DOKUMEN:

UU Desa No 6 Tahun 2014

Jokowi, Jusuf Kalla. Visi Misi dan Program Aksi. Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian. Jakarta, Mei 2014.

APJII. Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia. 2016.

Supangkat, Suhono Harso. SII. Layanan TIK dan Pembangunan Smart City

INTERNET :

Nama Desa Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta
<http://www.kabargunungkidul.com/daftar-alamat-web-desase-gunungkidul/> akses pada tanggal 04 April 2017

Website Desa Karangmojo

<http://karangmojo.desa.id/first> akses pada tanggal 04 April 2017

Website Desa Putat

<http://putat-patuk.desa.id/first> akses pada tanggal 04 April 2017

Jumlah berita SIDA SAMEKTA Kabupaten Gunung Kidul

<http://Sikab.gunungkidulkab.go.id> akses pada tanggal 20 Januari 2018

Identitas Penulis

1. Identitas Penulis Pertama

Nama Lengkap : Febri Setiawan Eka Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 14321172
Tempat Tanggal Lahir : Tulungagung, 04 Februari 1996
Program Studi : Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi
dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas
Islam Indonesia
Bidang Minat Studi : Spesifik PR
Alamat dan Nomor Kontak : Dsn. Tawang, DS. Pagersari Kec.
Kalidawir, Kab. Tulungagung, Prov.
Jawatimur.
No. hp 082243438400
febrisetiawan21@gmail.com

2. Identitas Penulis Kedua

Nama Lengkap dan Gelar Akademik : Sumekar Tanjung, S.Sos.,M.A
NIK/NIDN : 0514078702
Jabatan Akademik : Dosen Program Studi Ilmu
Komunikasi, Fakultas Psikologi dan
Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam
Indonesia
Alamat dan Nomor Kontak : Yogyakarta, 085743370314